

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE:  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 7

TAHUN 2006

## September, KK Rio Tinto di Lasamphala Diteken

JAKARTA – Pada September mendatang, pemerintah akan menandatangani Kontrak Karya (KK) dengan Rio Tinto untuk kegiatan pertambangan nikel di Lasamphala, wilayah perbatasan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Lama kontrak akan dibuat sama dengan KK milik PT International Nickel Indonesia (PT Inco) yakni selama 30 tahun.

Direktur Bina Usaha Mineral Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Mangantar S. Marpaung mengatakan, dengan ditandatanganinya KK tersebut akan menjadi hadiah buat Inggris yang akan dibawa Presiden SBY dalam kunjungannya ke negara itu akhir tahun ini.

Marpaung mengatakan, investasi yang bakal masuk diperkirakan mencapai US\$ 2 miliar. “Kami sudah sepakat dengan Rio Tinto untuk menekan KK untuk Lasamphala pada bulan sembilan (September, red), sekarang tinggal finalisasi bersama departemen terkait,” katanya, pekan lalu.

Dia mengatakan, untuk mengeluarkan persetujuan KK, perpajakan dan beacukai dibahas Departemen Keuangan, sedangkan penjualan dibahas Departemen Perdagangan. “Semua sudah mulai dibahas, kami telah berkirin surat soal KK, dan sekarang tinggal menunggu balasan dari departemen itu,” jelasnya.

Dia mengungkapkan, Rio Tinto meminta dalam perhitungan ro-

yalti yang disetorkan ke pemerintah menggunakan formula seperti milik Inco, yakni persentase royalti dikalikan harga patokan yang tergantung produksi nikel.

Marpaung mengatakan, royalti ini yang masih difinalisasi, mengingat saat ini telah keluar peraturan baru dalam PP 145 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tidak lagi menggunakan persentase, namun ditetapkan harganya untuk setiap bijih nikel yang diproduksi. “Ini yang sedang kami selesaikan,” katanya.

Menurut dia, Lasamphala belum dapat dipastikan cadangannya, karena belum dilakukan studi kelayakan (*feasibility study*). “Jika dihitung baru enam tahun setelah diteken KK-nya produksi bisa dimulai,” jelasnya. Pengolahan nikel Lasamphala akan menggunakan bahan kimia, berbeda dengan Inco dengan sistem peleburan dengan panas (metalurgi).

KK Rio Tinto akan masuk kategori KK generasi VII Plus. Maksudnya, KK itu tetap mengacu pada substansi-substansi KK generasi VII yang didasarkan UU NO 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan. Namun akan mengakomodasi substansi-substansi KK generasi VIII yang dibuat pemerintah mengacu RUU Minerba,” paparnya.

Nikel yang akan ditambang Rio Tinto jenis nikel limonit dan laterit atau jenis yang bukan kaya. Eksplorasi diperkirakan pada 2014. (ari)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE:  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 17

TAHUN 2006

## Perusahaan Harus Segera Lunasi DHPB

JAKARTA, KOMPAS — Perusahaan yang belum membayar dana hasil produksi batu bara atau DHPB diberi waktu sampai akhir Juni 2006 untuk melunasi kewajiban mereka.

Apabila tidak sanggup, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menyerahkan masalah itu ke Departemen Keuangan (Depkeu).

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara Departemen ESDM MS Marpaung mengemukakan hal tersebut, Jumat (9/6). "Kalau mereka tidak mampu, akan diserahkan kepada lembaga piutang negara," kata Marpaung.

Departemen ESDM sudah mengirimkan surat peringatan kepada perusahaan tersebut pada 10 Mei lalu. Bahkan, Departemen ESDM mengancam, perusahaan yang menolak membayar akan dinyatakan gagal bayar (*default*).

Berdasarkan data Departemen ESDM, ada enam perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang belum membayar DHPB sejak tahun 2001-2005.

Nilai tunggakan keenam perusahaan tersebut Rp 3,92 triliun. Keenam perusahaan itu menunggak pembayaran royalti karena pemerintah belum mengembalikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) batu bara yang telah mereka setor sebelumnya.

Selain keenam perusahaan itu, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada 15 perusahaan yang terlambat memenuhi kewajiban penyetoran DHPB.

Namun, ke-15 perusahaan tersebut tidak dikenakan denda yang jumlahnya Rp 2,89 miliar dan 3,25 juta dollar AS. Selain itu, ada dua perusahaan yang telah empat tahun tidak membayar kewajibannya sebesar Rp 31,76 miliar dan 5,51 juta dollar AS.

Marpaung mengatakan, DHPB seharusnya dibayar langsung, tidak ada skema mencicil. "Tapi tiap perusahaan punya alasan masing-masing atas kondisi keuangan mereka," ujarnya.

Ada perusahaan yang mengalami masalah internal dengan pemegang sahamnya sehingga sulit memutuskan hal-hal yang terkait dengan kebijakan keuangan, ada juga yang sulit ditagih lagi karena perusahaannya sudah bangkrut.

Secara terpisah, Ketua Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia Jeffrey Mulyono mengatakan, perusahaan yang diberi surat peringatan keberatan dengan ancaman *default* tersebut. "Itu sangat sensitif untuk kreditor, yang bisa menyatakan *default* seharusnya arbitrase internasional," kata Jeffrey.

Ia mengatakan bahwa perusahaan tambang tetap ingin penyelesaian pengembalian PPN yang sudah disetorkan sebelumnya. (DOT)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE:  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 1

TAHUN 2006

## Agincourt dan Antam calon pemilik Martabe

BISNIS INDONESIA

JAKARTA: Departemen ESDM menetapkan Agincourt Resources Limited dari Australia dan PT Aneka Tambang Tbk (Antam)—bersama konsorsiumnya yaitu perusahaan Afsel dan Malaysia—ikut lelang selanjutnya untuk menjadi pemegang hak eksplorasi tambang emas Martabe milik PT Newmont Horas Nauli (NHN).

Dirjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Departemen ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) Simon Felix Sembiring mengatakan kedua perusahaan tersebut lulus kriteria dalam proses lelang yang telah digelar pemerintah dan PT Newmont Pasifik Nusantara sebagai induk NHN belum lama ini.

Dalam waktu dekat ini, pemerintah akan memverifikasi kesanggupan kedua perusahaan tersebut untuk melakukan eksplorasi tambang emas dan tembaga yang telah ditaksir senilai US\$114 juta.

Sebelumnya, ada lima perusahaan pertambangan yang menjadi peserta lelang merebut Martabe di Sumatera Utara, yaitu PT Aneka Tambang Tbk beserta konsorsium, Agincourt Resources Limited, Avocet Resources, Herald Resources Ltd, serta Jusuf Merukh Group.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Mangantar S. Marpaung membenarkan dua perusahaan itu dan segera diklarifikasi.

Dalam penentuan pemenang pengelolaan tambang tersebut, pemerintah tidak hanya menilai dari sisi penawaran yang tinggi, tapi juga memperhatikan dukungan keuangan dan teknologi, keinginan untuk operasional, serta konsep pertambangan yang memperhatikan aspek lingkungan.

Selain itu, pemerintah juga memastikan penentuan pemenang tanpa lewat makelar (*middle man*), mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat, serta mempertimbangkan kepentingan nasional.

Marpaung menegaskan dalam proses lelang tersebut, Newmont tidak boleh menjual perusahaan di luar negeri. "Jangan *special purpose vehicle* (SPV) yang dijual. Namun, yang dijual PT Newmont Horas Nauli."

Jika SPV yang dijual, lanjutnya, Indonesia akan dirugikan. (K18)(redaksi @bisnis.co.id)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE:  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 7

TAHUN 2006

## Permenhut Hambat Usaha Tambang Batu Bara

NUSA DUA – Pengusaha nasional dan asing berpendapat, Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No 14 Tahun 2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan menghambat usaha tambang batu bara di Indonesia.

Keluhan itu mengemuka dalam Konferensi ke-12 Coaltrans Asia, 2-7 Juni di Bali International Convention Centre (BICC), Nusa Dua, Bali, yang diadakan perusahaan pertambangan dari 16 negara.

Direktur Pelaksana Coaltrans Conferences Ltd Gerard Strahan mengatakan, Permenhut tersebut menghambat karena mewajibkan pengusaha pertambangan batu bara menyediakan lahan kepada Departemen Kehutanan, sebagai kompensasi atas kawasan hutan yang dieksplorasi batu baranya. "Jika kewajiban itu tidak direalisasikan dalam waktu dua tahun, pengusaha dikenai dana ganti rugi sebesar 1% dari total nilai produksi batu bara. Belum lagi, ada pungutan ekspor batu bara 5% dan royalti 13,5%," kata Gerard.

Luke Devine, konsultan hukum luar negeri pada Baker & McKenzie/Hadiputranto, Hadinoto, and Partners, mengingatkan konsekuensi dihadapi para pengusaha pertambangan atas perubahan regulasi dari pemerintah Indonesia ini.

"Ketidakpastian kebijakan dan tambahan biaya produksi menghambat investasi batu bara di Indonesia. Indonesia menjadi lokasi investasi yang kurang menarik lagi bagi para investor asing," kata ke.

Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) dan Indonesian Mining Association (IMA) Jeffrey Mulyono meminta pemerintah bijak mendorong investasi batu bara. "Di negara lain tidak ada peraturan seperti itu," keluhnya.

Menteri Kehutanan MS Kaban bersikukuh, dana 1% bagi perusahaan batu bara yang tidak bisa memberi kompensasi lahan baru diperlukan untuk mengembalikan fungsi hutan yang rusak akibat penambangan. Sedangkan Dirjen Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi Simon Felix Sembiring mendukung agar Permenhut tersebut direvisi, karena memberatkan perusahaan tambang batu bara.

Departemen ESDM, lanjut dia, mengusulkan agar dana 1% untuk rehabilitasi hutan diambilkan dari royalti 13,5% sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). "Kami sudah berbicara dengan Departemen Kehutanan dan Departemen Keuangan. Bola kini ada di tangan Departemen Keuangan," jelas Simon. (tk)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE:  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN :

TAHUN 2006

# Tambang Batu Kapur Tuban

Dari kejauhan, hamparan hijau perbukitan itu terasa aneh karena salah satu sisinya ternyata tidak hijau lagi, melainkan rona putih yang mencolok mata seolah melambai untuk mengajak mendekat. Rona putih tersebut merupakan lapisan batu kapur yang terburai oleh aktivitas penambangan di Desa Menyunur Kecamatan Graba-

gan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, persisnya sekitar 20 kilometer arah selatan kota Tuban.

Pada salah satu sisi bukit yang berjarak hampir 4 kilometer dari jalan besar itu tampak sejumlah truk diparkir berderet. Sementara itu, suara reruntuhan batu dan gemuruh mesin ekskavator terdengar jelas memecah keheningan siang yang terik. Dua truk

maju secara perlahan menuju sebuah cerukan, mendekati ekskavator yang terus meraung-raung menggerus bibir bukit kapur.

Bongkahan batu besar dan kecil pun mulai berjatuhan, ekskavator mundur sekitar 3 meter, lantas mulai mengeruk batu-batu kapur tersebut dan memindahkannya ke dalam bak truk yang berada di belakangnya. Dalam waktu

15 menit, satu bak truk telah terisi batu kapur dengan berat muatan 3,5 hingga 4 ton. Truk kemudian bergerak maju menuruni bukit. Sebagian besar batu kapur tersebut dibawa ke Bojonegoro dan sebagian lagi dibawa ke Tuban untuk digunakan sebagai bahan pembuat jalan.

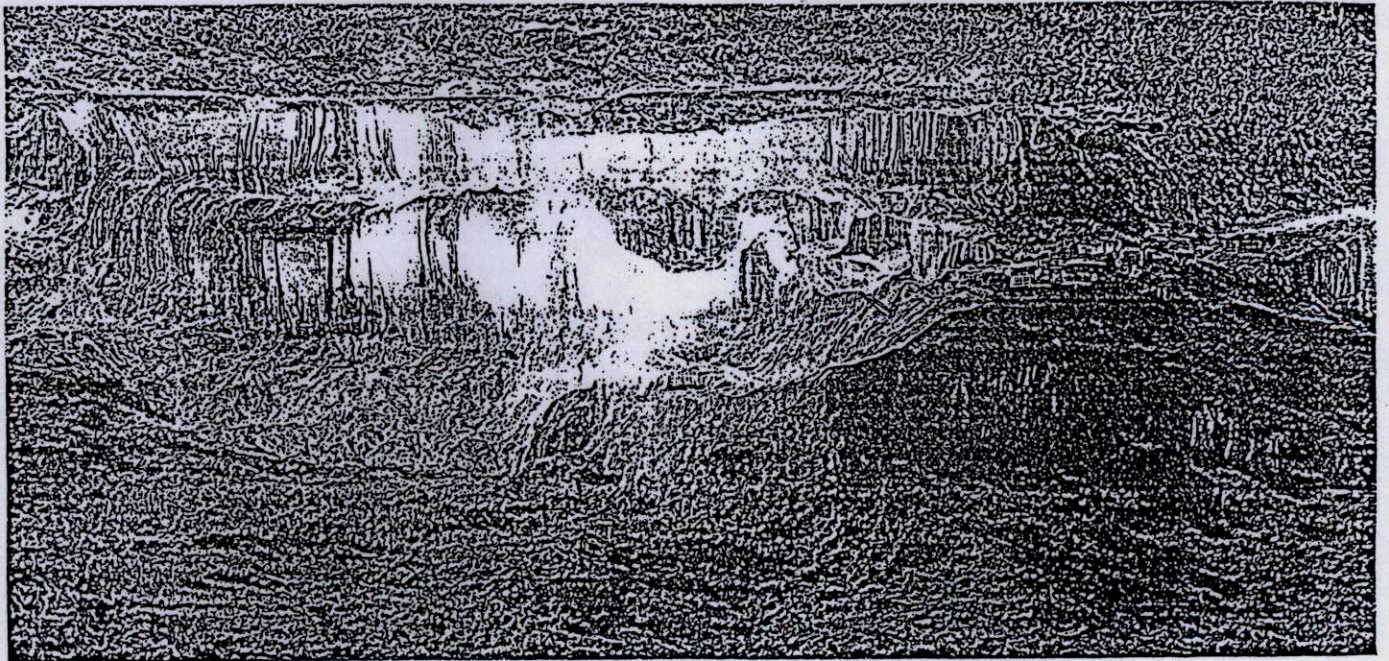
Dalam sehari ratusan truk datang untuk mengangkut batu ka-

pur, bahkan beberapa truk bisa mengangkut 2-3 kali dalam sehari. Aktivitas tambang batu kapur ini dimulai sekitar pukul 8 pagi dan berakhir menjelang pukul 5 sore, menyisakan luka-luka baru pada sisi bukit yang semakin lebar dari hari ke hari.

Foto-foto dan teks:  
Raditya Helabumi  
Jayakarna

39

Tidak Hijau Lagi





HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<ul style="list-style-type: none"> <li>● BISNIS INDONESIA</li> <li>○ INVESTOR DAILY</li> <li>○ KOMPAS</li> <li>○ KORAN TEMPO</li> <li>○ MEDIA INDONESIA</li> <li>○ PIKIRAN RAKYAT</li> <li>○ RAKYAT MERDEKA</li> <li>○ REPUBLIKA</li> <li>○ SUARA KARYA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ SEPUTAR INDONESIA</li> <li>○ SUARA PEMBARUAN</li> <li>○ SINAR HARAPAN</li> <li>○ TABLOID KONTAN</li> <li>○ THE JAKARTA POST</li> <li>○ MAJALAH GATRA</li> <li>○ MAJALAH TEMPO</li> <li>○ MAJALAH TRUST</li> <li>○</li> </ul>	
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN    FEB    MAR    APR    MEI    JUN    JUL    AGST    SEPT    OKT    NOV    DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN: 75		TAHUN 2006

## 4 Investor China lirik bahan tambang Sumbar

*BISNIS INDONESIA*

PADANG: Empat investor asal China akan berinvestasi pada sektor pertambangan di Provinsi Sumatra Barat.

Empat pemodal itu telah menjajaki potensi tambang di Provinsi Sumbar dan siap menanamkan modalnya.

Empat investor tersebut saat ini tengah menyiapkan proposal pembangunan industri tambang a.l. semen dan besi di daerah ini secepat mungkin yang dilengkapi dengan rencana kerja, target produksi, perkiraan biaya dan analisa pasar.

Wakil Ketua Umum Kadin Sumbar Bidang Kerja Sama Ekonomi Nasional dan Internasional Sam Salam mengatakan empat investor tersebut sangat serius untuk berinvestasi di sektor pertambangan.

"Investor tersebut menjanjikan waktu selama satu bulan untuk menyelesaikan uji sam-

pel bahan baku yang diberikan Kadin Sumbar di negaranya China sebelum pabrik semen dan besi tersebut didirikan," ujarnya akhir pekan lalu.

Dia tidak merinci nama-nama investor tersebut.

Menurut Sam, uji sampel itu dilakukan untuk memastikan kualitas salah satu bahan galian yang menjadi komponen penting bagi semen dan besi.

Jika uji sampel ini lancar, mereka kembali ke Sumbar untuk negosiasi mengenai persiapan pembangunan pabrik itu.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumbar, Bambang Istijono mengatakan daerah ini mengundang investor asing yang memiliki kemampuan finansial dan peralatan untuk menggarap potensi tambang pada kawasan hutan lindung tanpa mengubah fungsi hutan

lindung itu.

Sumatra Barat, menurut dia, memiliki 2,6 juta ha hutan lindung yang mengandung potensi tambang a.l. batu bara sebanyak 900 juta ton, batu kapur sebesar 7 miliar ton, granit 160 miliar ton, marmer 400 ton, dan dunit sekitar 2,5 juta ton.

Sementara itu, Sutikno Halim, eksekutif dari PT Teknowell di Medan, Sumatra Utara sebagai fasilitator investor China itu dengan Kadin Sumbar menyebutkan pemodal dari Negeri Panda itu tertarik berinvestasi di sektor pertambangan di Sumbar.

Menurut dia, para investor tersebut akan membangun pabrik pengolahan pada lokasi-lokasi penambangan yang hasilnya akan diekspor ke China.

"Jadi, mereka tidak membawa bahan mentah, tapi telah diolah," ujarnya. (K13)



HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE:  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: A 18

TAHUN 2006

## Freeport Kecewa kepada Norwegia

JAKARTA — PT Freeport Indonesia merasa keberatan atas penilaian Dana Pensiun Pemerintah Norwegia yang menyebutkan operasi penambangan di Papua merusak lingkungan.

Juru bicara Freeport Indonesia, Siddharta Moersjid, menjelaskan *tailing* dari operasi penambangan Freeport di Papua tidak beracun. "*Tailing* hanyalah batuan alami yang telah digerus halus, sisa dari proses di pabrik pengolahan," katanya kepada Tempo pekan lalu.

Dia menjelaskan, Freeport tidak menggunakan sianida ataupun merkuri dalam memproduksi emas dan tembaga.

Pekan lalu, Dana Pensiun Pemerintah Norwegia mencabut

investasi senilai US\$ 240 juta (sekitar Rp 2,16 triliun) di Freeport McMoRan Copper and Gold Inc. Alasannya, perusahaan tambang yang beroperasi di Papua ini dinilai telah melakukan kerusakan lingkungan sangat serius.

Menteri Keuangan Norwegia Kristin Halvorsen memaparkan keputusan itu diambil atas rekomendasi Council on Ethics.

Siddharta menjelaskan *tailing* disalurkan ke dataran rendah lewat aliran salah satu dari banyak sungai yang ada di sekitar daerah kerja Freeport. Di dataran rendah, *tailing* itu diendapkan dan dikelola dalam sebuah daerah yang dibatasi sistem tanggul. Di akhir masa tam-

bang, daerah pengendapan *tailing* akan direklamasi dengan tumbuhan lokal atau tanaman pertanian.

Program reklamasi itu, kata dia, sudah dilakukan selama bertahun-tahun dan terbukti tidak beracun. Indikasinya, tanaman lokal tumbuh dengan cepat dan merekolonisasi lahan *tailing* secara alami. "Tanaman pertanian juga tumbuh di atas *tailing*," katanya.

Dia mengatakan Freeport kecewa dengan keputusan Dana Pensiun Pemerintah Norwegia menarik investasi. Namun, pihaknya optimistis, hal itu tidak akan mempengaruhi harga saham Freeport McMoRan di pasar saham. ● NIEKE

43

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE:  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 15

TAHUN 2006

## Investasi ditaksir US\$2 miliar Kontrak Rio Tinto diteken September

BISNIS INDONESIA

JAKARTA: Pemerintah bersama perusahaan tambang asal Inggris, Rio Tinto berencana menandatangani kontrak eksplorasi pertambangan nikel di Lasamphala, Sulawesi pada September 2006.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Mangantar S. Marpaung, mengatakan pemerintah bersama Rio Tinto telah berupaya agar kontrak eksplorasi tambang nikel Lasamphala ditandatangani pada September mendatang.

Marpaung belum bisa memastikan jumlah investasi yang akan ditanam Rio Tinto di Lasamphala. Namun, dia memperkirakan investasi yang dibutuhkan dalam mengelola proyek tersebut sekitar US\$2 miliar.

Angka itu dari perbandingan nilai investasi tambang nikel di Kaledonia Baru sebesar US\$2,1 miliar. Mengenai royaltinya, pemerintah mengikat kontrak dengan harga US\$1,5 per pon.

Marpaung mengatakan saat ini antardepartemen terkait terus berkoordinasi mempersiapkan penandatanganan kontrak.

"Kalau semua [departemen terkait] setuju dan sepakat, kontrak dengan Rio Tinto pada September akan selesai diteken, sehingga saat ada kunjungan Presiden ke Inggris, ini merupakan hadiah buat Inggris dari pemerintah Indonesia."

Marpaung berharap agar instansi terkait seperti Departemen Perdagangan dan Ditjen Pajak serta Ditjen Bea Cukai dapat segera menyelesaikan tugasnya.

Menurut dia, tidak semua urusan persiapan penandatanganan kontrak karya pertambangan menjadi tanggung jawab Departemen ESDM. Urusan yang terkait dengan perpajakan menjadi urusan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Sementara penjualan, menjadi tanggung jawab Departemen Perdagangan.

"Saya sudah mengirim surat untuk bahas soal ini, Departemen Perdagangan sepertinya belum memberikan jawaban."

Rio Tinto memang sudah lama mengajukan

kontrak karya di Lasamphala Sulawesi. Namun, hingga kini belum ditanggapi pemerintah.

Hingga saat ini, katanya, belum bisa diperkirakan kuantitas produksi nikel yang bisa didapat dari kegiatan eksplorasi di Lasamphala. Kuantitas produksi nikel baru diketahui setelah dilakukan studi kelayakan.

Sebelumnya, Rio Tinto Group mengaku terganjal karena belum tercapainya kesepakatan tarif perpajakan dan masa penentuan produksi dengan pemerintah.

Perusahaan pertambangan asal Inggris tersebut belum melakukan eksplorasi karena masih menunggu kepastian perundang-undangan dan hukum pertambangan.

### **Kontrak 30 tahun**

Untuk di Sulawesi Selatan, Rio Tinto berencana membuka pertambangan nikel dengan kontrak yang direncanakan selama 30 tahun.

Investasi tersebut menyerap tenaga kerja Indonesia lebih dari 1.000 orang, dan memberikan penerimaan pajak lebih dari US\$4 juta per tahun.

Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro pernah mengusulkan dilakukan kontrak baru.

Dia juga mengatakan pengusaha tambang termasuk Rio Tinto, bisa memakai cetak biru yang dibuat instansinya, sembari menunggu selesainya UU Mineral dan Batubara.

Pengusaha tambang juga bisa menggunakan UU No. 11/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan atau UU No. 25 tentang Otonomi Daerah.

Purnomo mengatakan izin eksplorasi Rio Tinto di Sulawesi saat ini hampir selesai diproses pemerintah. Namun, dia mengaku antara pihak Rio Tinto dan pemerintah belum ada kata sepakat soal tarif pajak dan penentuan masa produksi.

Dirjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Simon F Sembiring menambahkan berdasarkan hasil pemrosesan yang dilakukan pihaknya terhadap izin eksplorasi Rio Tinto sudah akan final. Bahkan, pihak pemerintah daerah terkait telah menyepakati rencana eksplorasi perusahaan tambang asal Inggris tersebut. (R18) ([redaksi@bisnis.co.id](mailto:redaksi@bisnis.co.id))

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE:  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 9

TAHUN 2006

# Pemkab Bogor Serahkan Tambang Emas ke Swasta

**Pemkab beralasan karena tak memiliki dana untuk mengelolanya**

BOGOR — Dinas Pertambangan Kabupaten Bogor akhirnya menyerahkan pengelolaan tambang emas di kawasan Gunung Cibugis, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor kepada PT Aneka Tambang (PT Antam). Menurut Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Bogor, M Adjat, alasan penyerahan pengelolaan tambang kepada pihak swasta itu karena pemkab tidak mempunyai dana untuk mengelola kawasan yang disinyalir banyak mengandung emas itu.

Selain itu, kata Adjat, dinas sampai saat ini belum mengetahui apakah hasil produksi emas di kawasan tersebut dapat menguntungkan pemerintah setempat. "Kita sudah melakukan survey ke tambang emas itu, tapi kita belum tahu seberapa besar kandungan emas yang ada," kata Adjat, pekan lalu.

Dengan alasan itulah, lanjutnya, pemkab tidak berani mengambil risiko dengan mengelola sendiri lokasi tambang emas tersebut. Adjat mencontohkan, pemkab pernah memutuskan untuk menangani

tambang emas yang ada di gunung Pongkor. Namun lantaran saat itu harga emas turun, maka rencana tersebut dibatalkan. "Sebab perhitungan kami, antara biaya yang dikeluarkan dengan hasilnya tidak sesuai," ujarnya.

Kecuali alasan di atas, Adjat mengungkapkan, Pemkab Bogor sejauh ini tidak mempunyai peralatan yang memadai untuk mengelola tambang emas. Padahal, peralatan yang dibutuhkan selain harus lengkap, canggih, juga harganya mahal. "Kalau kami harus membelinya, berapa biaya yang harus dikeluarkan pemda," kilahnya.

Diakuinya, selain Gunung Cibugis, terdapat beberapa kawasan pertambangan emas yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Di antaranya di kawasan Pongkor dan Cariu. "Daerah tersebut pernah kami eksplorasi, tapi hasilnya sangat tidak memuaskan dan tidak bisa menutupi biaya operasional," tuturnya.

Adjat mengatakan, keputusan penyerahan tambang emas di kawasan Gunung Cibugis kepada PT Antam juga didasari pertimbangan lantaran kawasan yang menjadi tambang emas tersebut masih termasuk milik Perhutani. "Jadi keputusan kami, biar PT Antam, Perhutani, serta masyarakat yang mengelola."

Tiga komponen tersebutlah yang menurut Adjat paling

berkompeten dalam pengelolaannya. "Untuk hasilnya, dibagi secara proporsional, termasuk pemasukan bagi Pemkab Bogor," ungkapnya.

Namun, keputusan pemkab itu membuat, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bogor, Sumarli, kecewa. Pasalnya, Dewan merasa tidak pernah dilibatkan dalam pembicaraan yang berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak itu. "Seharusnya keputusan itu harus melalui persetujuan DPRD, tidak bisa secara sepihak begitu," ujarnya.

Sumarli melanjutkan, seharusnya segala sesuatu yang berhubungan dengan pihak ketiga atau kerja sama yang melibatkan pihak swasta, eksekutif harus membicarakannya terlebih dahulu dengan legislatif. "Ini menyangkut permasalahan masyarakat (kabupaten) Bogor, jadi semua harus dipertimbangkan dengan matang," tutur Sumarli.

Mengenai status kepemilikan tanah yang dikuasai Perhutani, anggota Fraksi PKS ini berpendapat, hal itu bisa disesuaikan menurut peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Dia menyebutkan sejumlah peraturan yang bisa dijadikan sandaran pemanfaatan kawasan hutan bagi pemerintah daerah. Di antara regulasi tersebut yaitu UU Nomor 41/1999, UU Nomor 19/2004, PP Nomor 1/2004, PP Nomor 44 dan

45/2004, PP 34/2005, Keppres 41/2004, serta Permehut Nomor p.14/menhut-II/2006.

Namun demikian, Sumarli sepakat bila rasio biaya perimbangan yang sepadan antara biaya operasional dan hasil yang bisa diperoleh, menjadi dasar pertimbangan kepada siapa pengelolaan tambang tersebut dilakukan.

Informasi yang diperoleh Republika, saat ini kegiatan penambangan di lokasi tersebut tidak saja dilakukan warga setempat, tetapi juga dari Kecamatan Nanggung, Kemang, Pamijahan, dan juga dari daerah luar seperti Tasikmalaya dan Bengkulu.

Untuk tiba di lokasi para penambang harus mendaki, melalui jalan yang terjal dan di sisi jalan terdapat jurang. Selanjutnya untuk memasuki lahan penambangan harus menuruni lereng Gunung Cibugis yang diperkirakan tingginya 15 meter. Sebab tanah yang mengandung kadar emas 12-68 persen itu lokasinya berada di bawah. ■ c42

## Fakta Angka

**12-68 persen**

Kandungan kadar emas di lokasi penambangan Gunung Cibugis